



LAPORAN PROYEK PERUBAHAN INSTANSIONAL

STRATEGI PEMENUHAN TARIF FULL COST RECOVERY PADA BUMD AIR MINUM

NAMA : RIRIS PRASETYO, M.Kom
N I P : 19750622 200312 1 001
N D H : 29

**DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT III
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TAHUN 2019**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Air adalah prinsip dasar segala sesuatu. Sejarah membuktikan air dapat menjadi penentu dalam bidang pertahanan dan keamanan suatu negara. Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945 menyatakan di atas struktur ekonomi dibentuk struktur politik yang mampu mewujudkan kesejahteraan umum. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa air merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Merupakan kewajiban Pemerintah Pusat dan Daerah untuk memperkuat struktur permodalan BUMD Air Minum agar mampu memberikan pelayanan air minum secara efektif dan efisien dengan tetap mampu menjaga pertumbuhan badan usaha. Untuk mewujudkan itu, Kepala Daerah dalam menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Tarif Air Minum harus berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016. Dalam hal proses perhitungan tarif, setelah dilakukan subsidi silang antar kelompok pelanggan dan/atau antar blok pemakaian air, diperkirakan belum memenuhi tarif FCR, maka BUMD Air Minum mengajukan subsidi tarif air minum yang bersumber dari APBD dengan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016. Kepala Daerah wajib menyampaikan tarif setiap tahunnya kepada Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah.

Untuk meningkatkan implementasi pemenuhan tarif air minum FCR pada BUMD Air Minum diperlukan alternatif solusi yang dituangkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan dengan menyediakan aplikasi perhitungan tarif air minum dan perhitungan subsidi yang bersumber dari APBD berbasis *worksheet*, sehingga Daerah dan pengurus BUMD Air Minum dapat memenuhi prinsip pengelolaan air minum yaitu keterjangkauan dan keadilan, mutu pelayanan, pemulihan biaya, efisiensi pemakaian air, perlindungan air baku dan transparansi & akuntabilitas.